

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Sutrisno (1984:200) pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah berasal dari : a.) Hasil pajak daerah b.) Hasil retribusi daerah c.) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d.) Dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk membiayai pembangunan daerah, salah satu modal yang digunakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 mendefinisikan,

Pendapatan daerah adalah arus masuk dari pemanfaatan ekonomi yang timbul dari aktivitas normal selama suatu periode. Sedangkan, Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Dibawah ini adalah tabel anggaran pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2011-2016:

Tabel 1.1

Pendapatan Daerah Kota Malang 2011-2016:

Tahun	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	158.446.783.268,90	162.332.588.459,55	2,45
2012	175.985.120.751,58	200.671.267.208,87	14,03
2013	298.417.399.028,87	317.850.423.684,26	106,51
2014	347.817.577.770,96	372.550.096.292,03	107,11
2015	363.978.160.111,08	424.938.755.525,02	116,75
2016	387.431.571.214,55	477.332.655.844,88	116,75

Sumber: www.malangkab.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 diatas data tersebut merupakan data sesudah dan sebelum direalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2011 sampai dengan 2016. Dapat dilihat bahwa ada perbedaan anggaran pendapatan asli daerah sesudah direalisasi dan sebelum direalisasi.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Desentralisasi fiskal adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom

berdasarkan asas otonomi. Menurut World Bank (1997b), desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung ada tiga mekanisme dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumentasi pertama mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah, jadi efek dinamis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ada hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi kedua, bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makroekonomi sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Dan argumentasi ketiga, mengatakan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda dengan negara maju dan berkembang. Bagi negara berkembang keuntungan-keuntungan dari desentralisasi ini tidak begitu didasarkan. Pendapat ini didasari karena kelembagaan di negara berkembang tidak memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk menggunakan informasi berkaitan dengan konstituennya. Pemimpin mungkin ditunjuk berdasarkan kekuasaannya. Alasan lain adalah bahwa pemerintah daerah di negara berkembang mungkin tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup dan lemahnya skill sumber daya manusia dalam mengelola anggaran.

World Bank (1997a), Martinez dan McNab (2001), kemudian juga mengingatkan bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro, yang pada gilirannya akan

menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilitas.

Di Indonesia, peneliti yang menjelaskan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat diantaranya Hirawan (2007) menyatakan bahwa Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan dalam berbagai aspek era otonomi daerah. Di bidang pendidikan, misalnya, dorongan pemerintah pusat untuk membangun sekolah-sekolah di setiap daerah yang telah meningkatkan tingkat pendaftaran (*enroll rate*) cukup tinggi. Sebagai indikator di bidang kesehatan masyarakat juga menunjukkan adanya perbaikan/peningkatan selama beberapa tahun terakhir; belanja publik secara riil untuk kesehatan dari tahun 2001-2006 naik hampir 100%. Juga Simanjuntak (2010) menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memang sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal.

Dalam kaitannya dengan manajemen makro ekonomi menurut simanjuntak (2010), isu-isu kunci yang menonjol adalah pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, inflasi, serta pelayanan publik. Sebagai ekonom percaya bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Sebagian lain meyakini bahwa desentralisasi mungkin dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, meski prosesnya cenderung

menyulitkan manajemen makroekonomi, memperlambat pertumbuhan, meningkatkan ketidakmerataan dan ketimpangan, serta memperburuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan bersifat ambiguitas itu tidak lepas dari ciri desentralisasi fiskal yang multidemensi.

Desentralisasi mempengaruhi pendapatan asli daerah karena desentralisasi fiskal sebagai penyerahan tanggung jawab belanja, penyerahan pengelola sumber pendapatan dan pinjaman atau hibah daerah. Pengelolaan sumber pendapatan yang harus diterima oleh pemerintah daerah. Pengelola pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan wewenangnya kepada daerah. Dimana dalam konteks desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah pada program sosial yang tepat pada konstituenya *United Nation Development Progame* (1990).

Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan dengan pemberian otonomi. Dengan adanya otonomi daerah memberikan tantangan kepada daerah untuk mandiri secara fiskal. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya, baik menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah dan mengembangkan sistem serta tata kelola daerah yang mencakup structural maupun infrastruktur sehingga daerah-daerah otonom mampu menghasilkan pendapatan guna merealisasikan pemerataan pembangunan daerah secara lebih

nyata dan mandiri. Hal ini yang mendorong suatu daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerahnya secara lebih efisien sebagai potensi local untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2009:139)

Beberapa studi menyoroti pengalaman negara-negara tertentu dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Bird dan Vaillancourt, 2000). Namun, harus diakui juga bahwa dasar teoritis yang menjelaskan kedua hubungan tersebut saat ini sedang dikembangkan dan banyak menjadi perdebatan di antara para ahli dalam berbagai literature teoritik dan empirik. Penelitian Oates (1993), Martinez dan McNab (2001) menghasilkan, desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Mereka berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah mengalokasikan dana kepada sektor ekonomi secara efisien daripada dilakukan pemerintah pusat. Tetapi, tidak akan terjadi jika desentralisasi fiskal tidak berjalan secara efektif (Martinez dan McNab, 2001).

Bambang dan Mahmudi (2012), tujuan akhir dari kebijakan dan kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, yang berarti implemtasi kebijakan dan perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Menurut Boediono (2009:29), stabilitas

ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat yang kita upayakan meningkat tidak digerogeti oleh kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi bersama-sama adalah kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pajak daerah, tenaga kerja, jumlah penduduk, dll. Menurut Todaro, 2000 (dalam Pujiati, 2008) terdapat tiga faktor komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital dan kemajuan teknologi.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat kemudian juga didukung di hipotesis "*trickle down effect*" (dampak merembes kebawah) yang melekat pada "*growth paradigm*" yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) (lihat Kuncoro, 2004 : 116). Bhalla (1994) membawa perpektif lain yang menghubungkan antara demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia). Ia menemukan pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya sebuah rezim demokratik cenderung lebih melindungi property dan hak kontrak yang sangat penting untuk berjalannya ekonomi pasar yang didorong oleh sektor swasta.

Menurut Kuncoro (2004: 117) walaupun Bhalla tidak secara langsung meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) dengan membalik sebab akibat, penemuannya mengimplikasikan hipotesis “*trickle down effect*” terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhatiannya adalah pada daya tahan demokrasi. Ketika demokrasi berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat dan akan menetes pada kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang karena merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah (Ratna dan Sriwardani 2017). Menurut Sanjaya (2012), pembangunan merupakan suatu perubahan dari keterbelakangan menjadi kondisi yang lebih maju sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, pertumbuhan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional (Todaro, 2000). Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

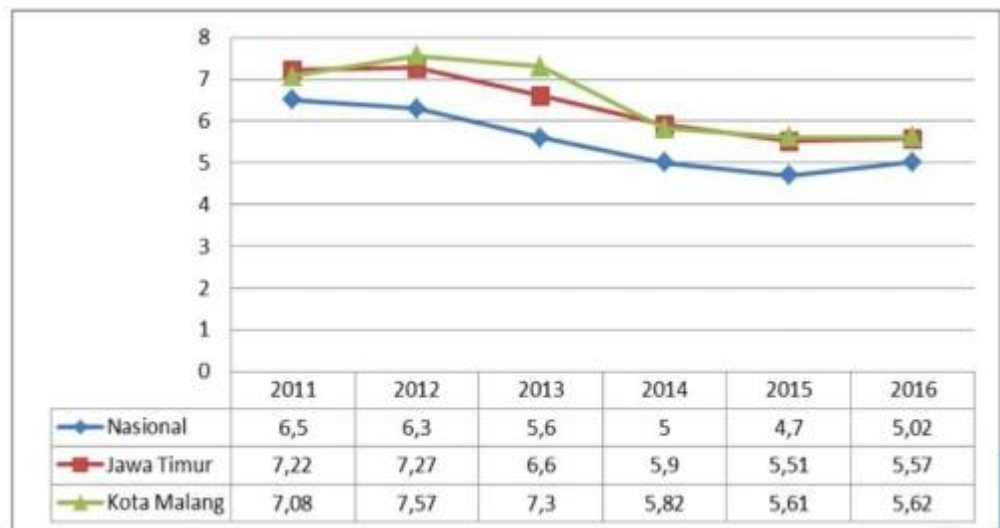
Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi di mana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha yang berkelanjutan yang diharapkan dapat

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi (Ratna dan Sriwardani 2017). Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output perkapita”. Dalam pengertian ini ada dua sisi yang perlu diperhatikannya inoutput total dan jumlah penduduk, sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi perspektif waktu jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik (Boediono, 2009).

Menurut data dari (wikipedia), Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dibawah ini adalah gambar grafik pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011-2016:

GAMBAR GRAFIK 1.2

PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MALANG



Sumber: www.malangkota.bps.go.id

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2015 ke 2016 yakni mengalami kenaikan sebesar 0,32. untuk Provinsi Jawa Timur laju pertumbuhan meningkat dari tahun 2011 ke 2012 sebesar 0,5. kemudian pada tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6. selanjutnya untuk khusus kota Malang laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun 2011 ke 2012 sebesar 0,49. selanjutnya pada tahun 2013 sampai 2015 laju pertumbuhan ekonomi menurun. Dan pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi naik 0,1. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ?
- 2) Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah ?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diidentifikasi dari latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka perlu dilakukan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Menurut penelitian dari Bambang Saputra (2013) desentralisasi fiskal diprosikan dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah daerah provinsi dalam satuan persen.
2. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertahun menurut harga konstan tahun 2010, yang dinyatakan dalam satuan persen.
3. Penelitian ini hanya membatasi Propinsi Jawa Timur di Karesidenan pada tahun 2013-2016 khususnya, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang,

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kondisi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah.

2. Bagi Pembaca

Sebagai informasi umum yang berguna mengenai pengaruh khususnya desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya serta menambah mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya berkaitan dengan ilmu akuntansi sektor publik dan penerapannya dalam kasus-kasus yang terjadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dibagi dalam lima Bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Berikut ini adalah kerangka penulisan laporan penelitian:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini berisi tentang uraian landasan teori, obyek penelitian, tinjauan pustaka atau hasil penelitian terlebih dahulu.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang uraian metode penelitian dan metode analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, analisa data dan pembahasan penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini berisi simpulan dan hasil pembahasan penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

